

2022



KANTOR GUBERNUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP BPBD DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, BPBD DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023
Kepala Pelaksana BPBD DIY,

Drs. Biwara Yuswantana, M.Si.
NIP. 19630817 198909 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja BPBD DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis pada BPBD DIY yakni **“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”**:
 - Diukur dengan ***Indeks Ketahanan Daerah*** berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
 - Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) DIY.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 80; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 80. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **100%**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
2. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.
3. Dinamika jenis ancaman bencana yang dihadapi, termasuk kelanjutan penanganan pandemi covid-19 di tahun 2022. Pandemi kali ini termasuk jenis bencana non-alam, kategori bencana dengan karakteristik *slow on- set disaster*, tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, termasuk mengakhiri status tanggap daruratnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan mandat BPBD dan pencapaian target-target kinerja BPBD ke depan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	5
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	7
1.4 Isu-Isu Strategis	8
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	18
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	28
3.2 Realisasi Anggaran	36
3.3 Inovasi	37
BAB 4 Penutup	42
LAMPIRAN	43

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2017-2022	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2022	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	23
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	24
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1	26
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja	27
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	29
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	30

Daftar Gambar



Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	22

Pendahuluan

Bab I berisi:

- *Cascading Kinerja*
- *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
- *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
- *Isu-Isu Strategis*
- *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
- *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

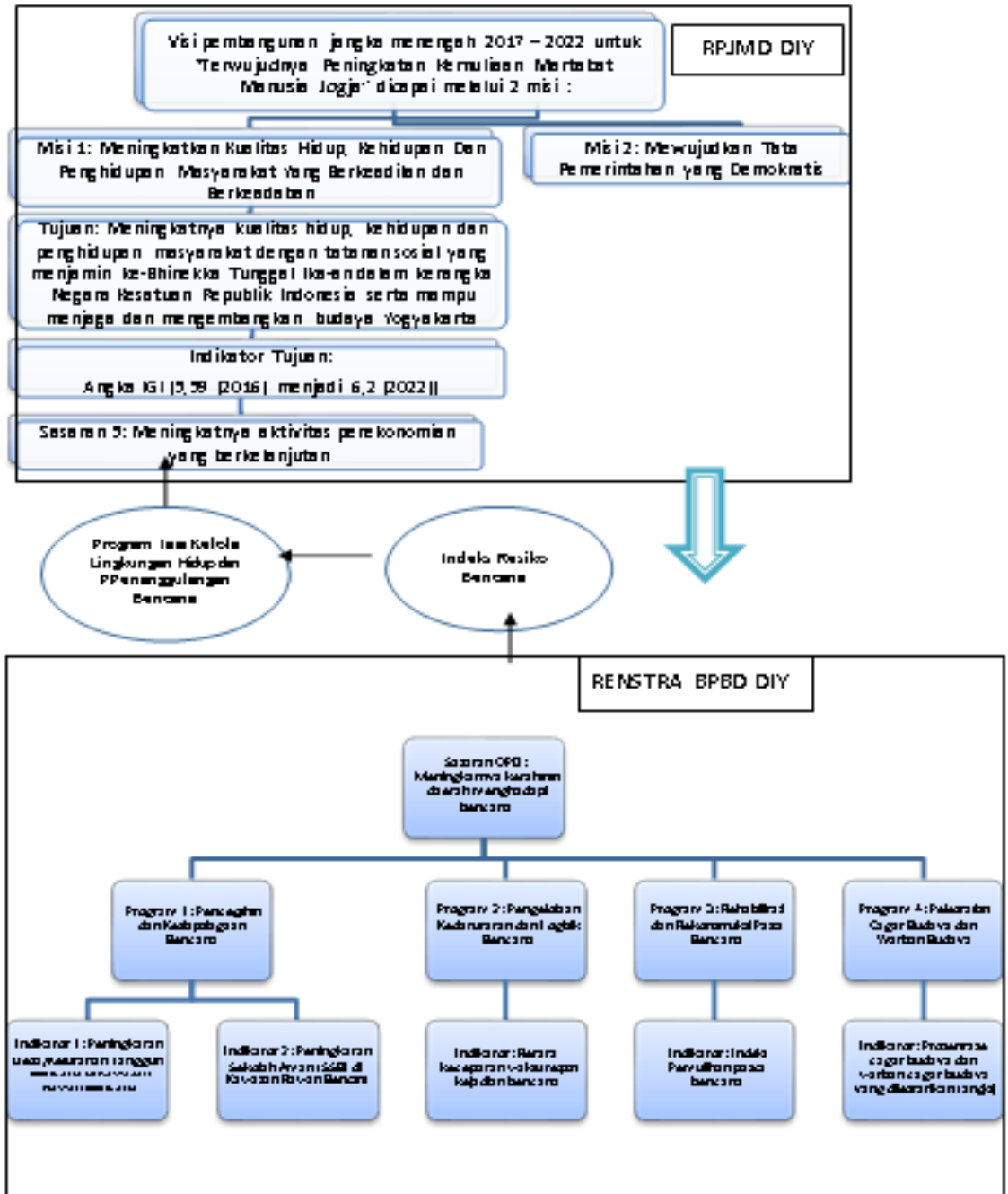
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. BPBD DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 *Cascading Kinerja*

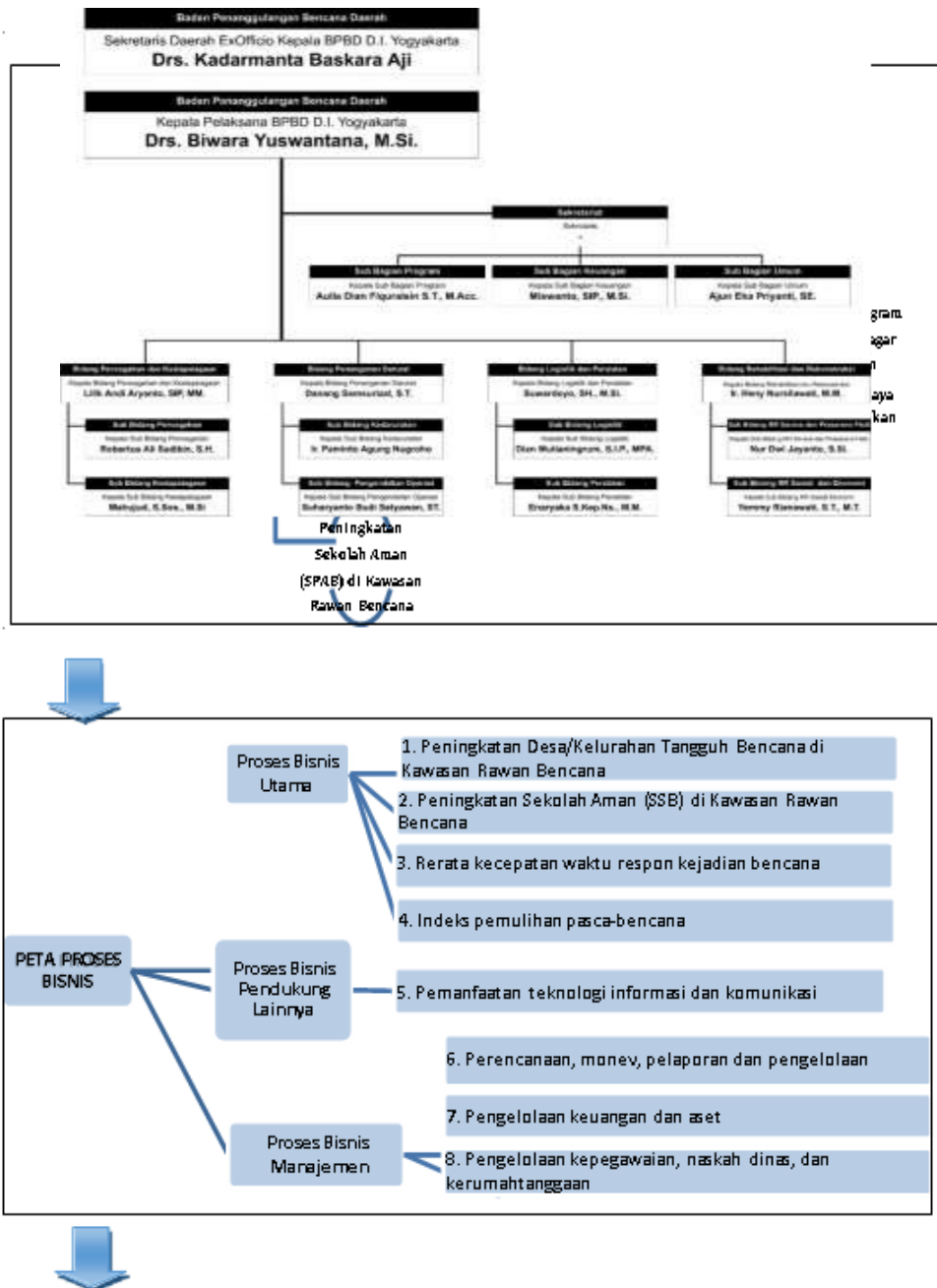


Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2017-2022

Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi BPBD DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur BPBD DIY



Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang dimandatkan dalam RPJMD, BPBD DIY memiliki tugas dan fungsi yang menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPBD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut: * penyusunan program kerja Badan; * perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah; * penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; * fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; * penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana; * pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan; * pelaksanaan komando penanganan darurat bencana; * pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah; * pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana; * pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana; * pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota; * pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
* Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Menurunkan risiko bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan

pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;

- d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
 - e. Pengembangan PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non- pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
 - f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
 - g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
 - h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
 - i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
 - j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Penanganan Darurat
 - a. Melakukan pencegahan dan antisipasi terkait risiko bencana yang kemungkinan terjadi selama tahun 2022 seperti pada aktivitas Gunung Merapi
 - b. Mitigasi dalam menghadapi cuaca dan iklim ekstrim
 - c. Melakukan tindak lanjut status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di kabupaten, serta mempercepat vaksinasi dan pengobatan terhadap hewan sakit terdampak PMK
 - d. Melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan/puncak musim hujan Tahun 2022/2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standard pelayanan.
 - b. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
 - c. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana.
 - d. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
 - d. Meningkatkan sinergitas penanganan pasca bencana lintas sektor.
5. Kegiatan Rapat Kerja Teknis TRC menghasilkan beberapa kesimpulan yang terdiri dari :
- a. TRC kab/kota bekerja sesuai dengan Tupoksinya, yakni Kaji Cepat sesuai dengan peraturan yang ada; Bahwa TRC merupakan ujung tombak BPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kab/kota; Perlunya kesamaan persepsi, komunikasi dan koordinasi TRC dengan BPBD maupun lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan baik personil maupun peralatannya; Alur penanganan bencana sudah terintergrasi dan perlu ditingkatkan secara professional baik antar kab/kota maupun provinsi.
 - b. Meningkatkan kualitas dan semangat bagi unsur penanggulangan bencana di dalam pelaksanaan tugas dimana muaranya adalah dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan secara cepat, tepat dan aman; Masih terdapat kendala dalam penanggulangan bencana di Kab. Gunungkidul; Perlunya formula yang tepat untuk komunikasi dan koordinasi BPBD melalui TRC dengan multi pihak dan lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan maupun personil dari Provinsi ke Kab/Kota.

- c. Cukup banyak sumber air yang mayoritas belum dimanfaatkan; Masih banyak kendala dalam pemanfaatan sumber air di Kab. Gunungkidul; Dalam pengelolaan pemanfaatan air harus melibatkan semua OPD; Diperlukan maintance untuk mempertahankan pengelolaan sumber air; Diperlukan program jangka menengah dan jangka panjang untuk meminimalisir kekeringan di Kab. Gunungkidul.

Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi				Jumlah	Kualifikasi					
			S2	S1	D3	SMA			S2	S1	D3	SMA	Laki-laki
1	JPT	1					1	1				1	
2	Administrator	5					5	3	2			3	2
3	Pengawas	2					2	2				1	1
4	JF	12					12	9	3			6	6
5	Pelaksana	23					23	3	11	2	7	15	8

Sumber: Data Kepegawaian per 31 Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 16 orang (38,63%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang (40,90%), kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 2 orang (4,54%) dan terakhir SMA 7 orang (15,90%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 26 orang (60,46%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 17 orang (38,63%).

Terdapat kekosongan pada Jabatan Substantif yakni Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2 orang, dan Pengelola Sistem dan Jaringan kosong 1 orang sehingga pada Subbag Program hanya terdiri dari 1 (satu) orang Perencana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD DIY sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	3.183	62.756.797.123,69
			1		TANAH	0	0
			1	1	TANAH	0	0
			2		PERALATAN DAN MESIN	2.931	46.390.504.073,69
			2	1	ALAT BESAR	65	3.477.915.918,00
			2	2	ALAT ANGKUTAN	63	19.220.647.532,00
			2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	91	285.697.000,00
			2	4	ALAT PERTANIAN	98	145.500.000,00
			2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.152	3.501.991.339,02
			2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	472	13.130.003.156,00
			2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	180	660.887.954,94
			2	8	ALAT LABORATORIUM	78	536.031.004,73
			2	9	ALAT PERSENJATAAN	236	746.610.800,00
			2	10	KOMPUTER	258	1.901.720.394,00

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			2	11	ALAT EKSPLORASI	0	0
			2	12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
			2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	221	2.104.277.300,00
			2	16	ALAT PERAGA	0	0
			2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
			2	18	RAMBU - RAMBU	9	80.175.000,00
			2	19	PERALATAN OLAH RAGA	8	599.046.675,00
			3		GEDUNG DAN BANGUNAN	14	9.308.799.350,00
			3	1	BANGUNAN GEDUNG	14	9.308.799.350,00
			3	2	MONUMEN	0	0
			3	3	BANGUNAN MENARA	0	0
			3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
			4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	15	6.638.348.700,00
			4	1	JALAN DAN JEMBATAN	2	1.485.268.000,00
			4	2	BANGUNAN AIR	1	419.397.900,00
			4	3	INSTALASI	5	4.406.182.000,00

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			4	4	JARINGAN	7	327.500.800,00
			5		ASET TETAP LAINNYA	223	419.145.000,00
			5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	221	54.528.000,00
			5	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1	24.940.000,00
			5	3	HEWAN	0	0
			5	4	BIOTA PERAIRAN	0	0
			5	5	TANAMAN	0	0
			5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
			5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	339.677.000,00
			6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			6	1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
			7	1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
			7	2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			7	3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
			7	4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	1	5			ASET LAINNYA	146	531.765.340,00
			2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			3		ASET TIDAK BERWUJUD	5	394.500.000,00
			3	1	ASET TIDAK BERWUJUD	5	394.500.000,00
			4		ASET LAIN-LAIN	141	137.265.340,00
			4	1	ASET LAIN-LAIN	141	137.265.340,00
			5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			5	1	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			6	1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
					TOTAL	3.329	63.288.562.463,69

Sumber: Data Aset BPBD DIY Tahun 2022

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 20 (dua puluh) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Secara kuantitatif rasio perangkat komputer (personal komputer/ laptop) dibanding jumlah pegawai masih belum mendekati 1:1, serta kurang kompatibel dengan kebutuhan teknologi terkini.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0	Rp0	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	
			Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp24.680.321.040	Rp26.028.098.972	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.403.761.690	Rp9.988.651.068	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.057.884.350	Rp13.908.337.904	
5	1	05	Belanja Hibah	Rp2.218.675.000	Rp2.131.110.000	
5	2		BELANJA MODAL	Rp278.564.600	Rp278.564.600	

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp278.564.600	Rp278.564.600	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp76.500.000	Rp0	
			Jumlah Belanja	Rp25.035.385.640	Rp26.306.663.572	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp26.306.663.572)	(Rp26.306.663.572)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY semula Rp 25.035.385.640 dan mengalami perubahan menjadi Rp 26.306.663.572 atau bertambah Rp 1.271.277.932 . Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan cerminan dukungan Biro Organisasi Setda DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan

dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja OPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dengan penekanan pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi internal;	1. Mengintensifkan monev berkala capaian kinerja program/kegiatan (realisasi fisik maupun realisasi keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
2.	Dalam rangka meningkatkan keandalan pengumpulan data kinerja, agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna melakukan validasi atas perhitungan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan indikator sasaran SKPD.	1. Melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia).

BAB 1 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

- Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- Strategi dan Arah Kebijakan
- Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, BPBD DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, BPBD DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program

sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BPBD DIY selama lima tahun adalah:

“Menurunkan risiko bencana”

Adapun sasaran BPBD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis BPBD DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka/ Indeks	64,5	68	71	74	77	80	80

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY	1) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan
		2. Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat	2) Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya
		3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana	3) Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja

			4) Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua Tingkatan
--	--	--	--

Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPBD DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1.1. Program Penanggulangan Bencana	10.064.977.250	11.618.397.004	
	1.2. 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.034.947.000	1.034.947.000	
	1.2.1.1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	226.947.000	226.947.000	
	1.2.1.2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	808.000.000	808.000.000	
	1.2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7.268.912.500	8.832.332.254	
	1.2.2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	206.121.000	206.121.000	
	1.2.2.2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	33.553.000	33.553.000	
	1.2.2.3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	894.534.500	894.534.500	
	1.2.2.4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.532.397.000	2.595.817.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.2.5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3.170.600.000	4.670.600.000	
	1.2.2.6. Penanganan Pascabencana Provinsi	171.337.000	171.337.000	
	1.2.2.7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	260.370.000	260.369.754	
	1.2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.653.448.000	1.643.448.000	
	1.2.3.1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	250.194.000	250.194.000	
	1.2.3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.403.254.000	1.393.254.000	
	1.2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	107.669.750	107.669.750	
	1.2.4.1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	69.119.750	69.119.750	
	1.2.4.2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	38.550.000	38.550.000	
	1.3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	839.000.000	971.968.800	
	1.3.1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	839.000.000	482.519.000	
	1.3.1.1. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	550.000.000	482.519.000	
	1.3.2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	289.000.000	489.449.800	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.3.2.1. Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	289.000.000	489.449.800	
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	10.903.977.250	12.590.365.804	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		10.903.977.250	12.590.365.804	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.131.408.390	13.716.297.768	(415.110.622)
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.232.000	46.232.000	0
	1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.886.000	39.886.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.338.661.690	9.923.551.068	(415.110.622)
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.385.000	9.385.000	0
	1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.384.000	18.384.000	0
	1.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	0
	1.5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.600.000	42.600.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.500.000	22.500.000	0
	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	22.500.000	0
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.369.000	564.869.000	76.500.000
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.344.000	37.344.000	0
	4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.990.000	46.990.000	0
	4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	0
	4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.035.000	440.535.000	76.500.000
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.891.600	93.891.600	0
	5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	93.891.600	93.891.600	0
	6. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1.459.327.200	1.459.327.200	0
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	488.300	(9.511.700)
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	665.138.900	674.650.600	9.511.700
	6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.188.300	784.188.300	0
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.570.191.900	1.493.691.900	(76.500.000)
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.992.900	599.992.900	0
	7.2. Pemeliharaan Mebel	5.400.000	5.400.000	0
	7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	481.799.000	405.299.000	(76.500.000)
	7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	483.000.000	483.000.000	0
	Total Anggaran Pendukung	14.131.408.390	13.716.297.768	(415.110.622)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun

Perjanjian Kinerja Kepala BPBD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya	Indeks Ketahanan	Angka	80	Triwulan I	80
	ketahanan daerah	Daerah			Triwulan II	80
	menghadapi				Triwulan III	80
	bencana				Triwulan IV	80*)

Pada tahun 2022, BPBD DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana BPBD DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya	Indeks Ketahanan	Angka	80	Triwulan I	80
	ketahanan daerah	Daerah			Triwulan II	80
	menghadapi				Triwulan III	80
	bencana				Triwulan IV	80*)

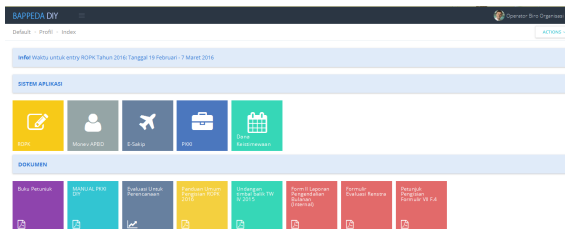
Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran bertambah 4,7% sehubungan adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

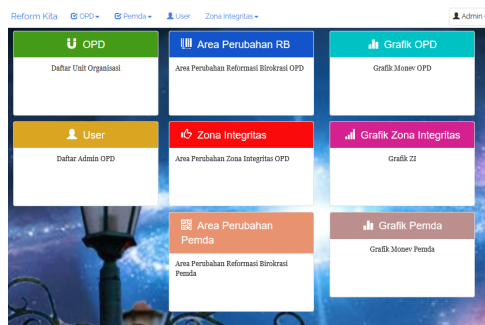
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi Co reforms space yang mengintegrasikan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar II.2. Co Reforms Space



Sumber: [http:// https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/coreformspace/menu.php/](http://https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/coreformspace/menu.php/)

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

- *Capaian Kinerja Tahun 2022*
- *Realisasi Anggaran*
- *Inovasi*
- *Lintas Sektor*

Capaian Kinerja Tahun 2022

Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Pelaksana BPBD DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2021	Capaian 2022	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
							TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<u>Indikator:</u> Indeks Ketahanan Daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY	Angka	64,5	79	80	80	80	100	Sangat Baik	80

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Sasaran 1: Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.Rumusan Indikator dan Formulasi

Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4

1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY
---	--	-------------------------	--------------------------------------

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
2. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana;
3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

**Penjelasan atas perhitungan Indeks Ketahanan Daerah terlampir*

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah	79	80	80	100 (80/80*100)	80	80/80*100= 100

Keterangan kolom (6): nilai indeks ketahanan daerah tercapai melebihi target yang ditentukan sebesar 1,2.

Berdasarkan Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2022, dapat dilakukan analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai berikut:

- Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 80 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 100% maka target tahun 2021 tercapai melebihi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu 79 (102,5%), capaian tahun ini sebesar 80 terdapat penurunan sebesar 2,5 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD saat ini mencapai 100% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 80 pada akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Ketercapaian kinerja sasaran didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

- A.** Melaksanakan **Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)** sesuai Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB tahun 2022 dengan target 55 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) yang terdiri dari SMA/SMK Negeri dan swasta terdiri dari 35 Lanjutan Tahun 2021 ditambah 20 Rintisan tahun 2022 sudah diluncurkan secara bersamaan pada awal bulan November 2022. Adapun Sekolah yang diluncurkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- 1. Kab. Gunungkidul:** 1. SMK Muh. 1 Patuk, 2. SMA IKIP Veteran III Tambak Romo, 3. SMK Muh. Tepus, 4. SMK Sanjaya Ngawen, 5. SMAN 1 Semin, 6. SLBN 1 Gunungkidul, 7. MA YAPPI Gubugrubuh, 8. SMAN 1 Panggang, 9. SMKN 1 Saptosari, 10. SLBN2 Gunungkidul, 11. Ponpes Darul Qur'an.
 - 2. Kab. Bantul:** 1. SMK Negeri 1 Pajangan, 2. SMKN 1 Pleret, 3. SMK Maarif 1 Piyungan, 4. SMK Muh Kretek, 5. MAN 3 Bantul, 6. SLBN 1 Bantul, 7. SMA Pangudi Luhur, 8. SMAN 1 Dlingo, 9. SMKN 1 Pandak, 10. SLB Mardi Mulyo, 11. MTSN 5 Bantul.
 - 3. Kab. Kulon Progo:** 1. SMAN 1 Lendah, 2. SMAN 1 Nanggulan, 3. SMK BOPKRI Wates, 4. SMAN 1 Wates, 5. SMKN2 Pengasih, 6. SLBN1 Kulon Progo, 7. MAN 2 Kulon Progo, 8. SMKN 1 Kokap, 9. SMAN 1 Temon, 10. SLB Muhammadiyah Dekso, 11. MTSN 4 Kulon Progo.
 - 4. Kab. Sleman:** 1. SMA Negeri 1 Godean, 2. SMA Negeri 1 Mlati, 3. SMK YPKK 2 Sleman, 4. MA Negeri 5 Sleman, 5. SMK Ma'arif 2 Sleman, 6. SLB Negeri 1 Sleman, 7. SMK Muh. 2 Turi, 8. SMA Negeri 1 Ngemplak, 9. SMK Negeri 1 Ngaglik, 10. SLB C Wiyata Dharma, Plumbon Mororejo Tempel Sleman, 11. MTs Negeri 7 Sleman.

5. **Kota Yogyakarta:** 1. SMK Muh.3 Yogyakarta, 2. SMA Gotong Royong., 3. SMAIT Abu Bakar, 4. SMA BOPKRI 2 Yogyakarta, 5. SMK Ma'arif 1 Yogyakarta, 6. SMAN 11 Yogyakarta., 7. SLB N Pembina, 8. SMA Negeri 9 Yogyakarta, 9. SMK BOPKRI 1 Yogyakarta, 10. SLB N 1 Yogyakarta, 11. MA Mu'allimat Muhammadiyah.

B. **Pembentukan Desa Tangguh Bencana** sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 25 (lima) kalurahan/kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota di DIY. Adapun Desa/Kalurahannya adalah sebagai berikut:

1. **Kota Yogyakarta:** 1. Kelurahan Kadipaten Kemantren Kraton, 2. Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo, 3. Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede, 4. Kelurahan Wirobrajan Kemantren Wirobrajan, 5. Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, 6. Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman, 7. Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondomanan, 8. Kelurahan Patehan Kemantren Kraton.
2. **Kabupaten Kulon Progo:** 1. Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan, 2. Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur, 3. Kalurahan Depok Kapanewon Panjatan, 4. Kalurahan Tirto Rahayu Kapanewon Galur, 5. Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang, 6. Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh.
3. **Kabupaten Gunungkidul:** 1. Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar, 2. Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen, 3. Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop, 4. Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari, 5. Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari, 6. Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan, 7. Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari, 8. Kalurahan Gading Kapanewon Playen.
4. **Kabupaten Bantul:** 1. Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, 2. Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, 3. Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu.

C. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana menjadi 10 detik

Penghitungan rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana merupakan hasil penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memverifikasi laporan dan sampai adanya petugas penanganan di lapangan. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana dihitung dari penghitungan kecepatan waktu respon penanganan laporan dari kejadian utama yang dilaporkan (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun.

D. Indeks Pemulihan Pascabencana sebesar 136%.

Berdasarkan nilai DRI pada masing-masing kabupaten dan kota diperoleh nilai DRI Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar 136%. Capaian tersebut naik sebesar 14,56% dari capaian tahun 2021 dengan capaian 121,44%. Capaian DRI sebesar 136% tersebut merupakan tingkatan tertinggi berdasarkan standar klasifikasi perhitungan tingkat DRI suatu daerah.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Koordinasi dengan BPBD Kab/Kota berjalan dengan baik
- b. Koordinasi dengan Stakeholder terkait PB berjalan baik
- c. Koordinasi dengan akademisi berjalan dengan baik
- d. Koordinasi dengan Pokja BLP berjalan dengan baik
- e. Pendampingan oleh Tim Inspektorat
- f. Pendampingan pelaksanaan Hibah oleh BPKA dan Bappeda
- g. Sudah ada panduan penyelenggaraan SPAB dan Destana, dan penilaian indeks ketahanan daerah

Faktor Penghambat keberhasilan (*Jika indikator kinerja tidak tercapai*)

- a. Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai : Kesulitan suku cadang Sweeper truck, dan ATV
- b. Dalam kegiatan Destana tidak disediakan dukungan baju identitas bagi relawan yang sudah dilatih
- c. Menyesuaikan jadwal akademik untuk kegiatan SPAB

Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	80	80	100	26.306.663.572	24.391.977.565	92,72	
Jumlah						26.306.663.572	24.391.977.565	92,72	
Total Belanja Operasional						26.306.663.572	24.391.977.565	92,72	

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Th 2022, Laporan Keuangan BPBD DIY Th 2022

Berdasarkan tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran BPBD DIY melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp26.306.663.572,00 terealisasi Rp24.391.977.565,00 atau 92,72 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp1.914.686.007 atau 7,28% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

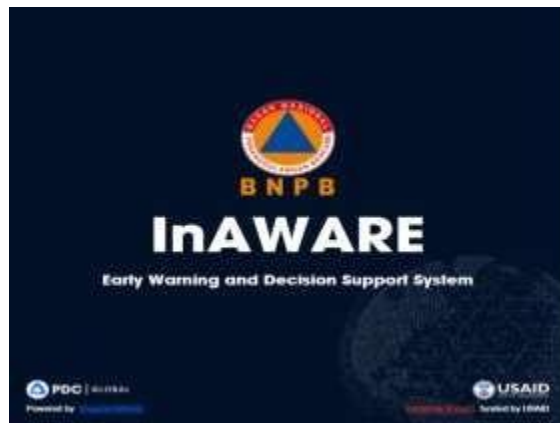
Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan, SIPKD yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, serta aplikasi E-Lapor DIY untuk mengelola layanan aduan.

Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi **InaWARE**

dan **DIBI** yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi **PAMOR** yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY.

Gambar III.2 Sistem informasi kebencanaan InaWARE



Sumber: <https://inaware.bnpb.go.id/inaware/>

PAMOR Gambar III.3 Sistem informasi kebencanaan DIBI



Sumber: <http://bnpb.cloud/dibi/>

Gambar III.4 Sistem informasi kebencanaan



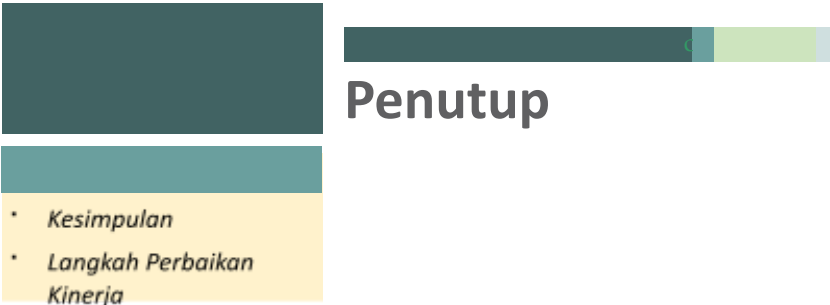
Sumber: <http://pamor.jogjaprovo.go.id/>

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka BPBD DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung BPBD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel
Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Manfaat bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Dukungan Pelaksanaan Launching 55 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di DIY	Badan Musyawarah Perbankan Daerah	Bantuan Peralatan berupa HT pada saat Launching SPAB		55 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dilaunching	Alat Komunikasi yang dapat dipakai pada saat bencana
2	Informasi kondisi cuaca, gempa, dan iklim	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat
3	Informasi Perkembangan dan kondisi Gunung Merapi	BPPTKG	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat



Penutup

- *Kesimpulan*
- *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja BPBD DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Uraikan hambatan permasalahan kinerja (dapat diidentifikasi dari factor man, money, material, method, machine; factor proses manajemen: *planning, organizing, actuating, controlling*; faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis yang ada selama ini berjalan.
2. Uraikan faktor kunci keberhasilan.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan bencana;
2. Melakukan pengurangan risiko bencana di sektor-sektor utama pembangunan daerah;
3. Melakukan mitigasi bencana struktural dan non struktural;
4. Memastikan kesiapan sistem penanggulangan bencana di daerah;
5. Melakukan kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya bencana
6. Mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana yang terstandarisasi;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana;
8. Meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan darurat bencana;

9. Mengembangkan mekanisme pemulihan pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana dan berkelanjutan.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554208
Website: bpbdd.jogjapro.go.id, Email: bpbdd@jogjapro.go.id, Kode Pos: 55166

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp. 11.618.397.004,00
2.	Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	Rp. 13.716.297.768,00
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 26.306.663.572,00

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Subkegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Rp482.519.000,00
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Rp489.449.800,00

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENKUM BUDIONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA BPBD DIY,

Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si.
NIP. 19630817 198909 1 001

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjapro.go.id
website: http://inspektorat.jogjapro.go.id/ Kode Pos 55288

Yogyakarta, 21 - 03 - 2022

Nomor : 700 / 011.83

Lampiran : -

Sifat : Rahasia

Kepada

Yth. Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

di _

Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (Output);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (Outcome);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 81,16 kategori A dengan interpretasi Memuaskan (Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel).
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,27 atau 90,89% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,84 atau 87,35% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,64 atau 70,94% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,67 atau 76,67% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,75 atau 68,75% dari bobot sebesar 20%.

5. Terhadap ...



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA